

Ide-Ide

Untuk Pemantapan Jati Diri Ilmu Administrasi Negara

Editor : Argo Pambudi

Makalah Pengantar oleh : Prof. Dr. Jusuf Irianto, M.Com
(Guru Besar Ilmu Administrasi Negara Universitas Airlangga, Surabaya)

Diterbitkan atas kerjasama Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Universitas Negeri Yogyakarta dengan Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara (ASIAN)



Ide-ide untuk
Pemantapan Jati Diri
Ilmu Administrasi Negara

Cetakan pertama 1, 2011

Design Cover : Nanto

Editor : Argo Pambudi

Tata letak : Topo

Penerbit : CAPIYA PUBLISHING

Jl. Banuriyadi Kadir No. 1 Kenjeran Surabaya

Jl. Kaliurang Km 7. Jl. Flamboyan II No. 14a Yogyakarta

Email: capiya.inc@gmail.com

xviii + 554 – 17,2 x 25,0

ISBN 978-602-97348-7-6-0

ii Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apa pun, termasuk fotokopi, tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Dicetak oleh Percetakan Kanisius Yogyakarta

Daftar Isi

- Halaman Judul.....	i
- Kata Pengantar Editor/Eks Ketua Panitia Simposium Nasional Ilmu Administrasi Negara untuk Indonesia FISE Universitas Negeri Yogyakarta, 25 – 26 Maret 2011	iii
- Daftar Isi.....	vii
- Makalah Pengantar : Berfikir Jernih tentang Administrasi Negara : Menuju Masyarakat Madani Oleh : <i>Prof. Dr. H. Jusuf Irianto, M.Com.</i> Guru Besar Ilmu Administrasi Negara Universitas Airlangga, Surabaya	xi

BAGIAN I

BIDANG REFORMASI BIROKRASI DAN SUMBER DAYA MANUSIA

1. Reformasi Rekrutmen CPNS di Kabupaten Sleman, Suatu Perspektif Reformasi Administrasi Oleh : <i>Wayu Eko Yudiantmaja</i> (Universitas Andalas, Padang)	2
2. Sertifikasi Kompetensi Pejabat Struktural sebagai <i>Quality Assurance</i> Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Oleh : <i>Agus Wahyu Adianto, S.Psi., S.E.</i> (Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur I Lembaga Administrasi Negara RI)	15
3. <i>Public Service Motivation</i> dan Urgensinya dalam Rekrutmen dan Seleksi CPNS Oleh : <i>Drs. Syamsir, M.Si</i> (Universitas Negeri Padang)	41
4. <i>Mystery Shopping</i> sebagai Alat Untuk Mengontrol dan Mengukur Kinerja Pegawai <i>Frontline</i> Pelayanan Publik Oleh : <i>Fajar Rezky Aprilian, S.IP & Dr. Ali Rokhman</i> (Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto)	58

5. Peranan Sikap Aparatur dalam Peningkatan Kepuasan Warga dengan Pelayanan Publik Oleh : <i>Drs. H.Dasman Lanin, M.Pd.</i> (Universitas Negeri Padang)	76
6. Membangun Budaya Birokrasi Indonesia Oleh : <i>Chafid Diyanto, S.Sos & Dr. Ali Rokhman</i> (Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto)	91
7. Ethical Consideration in the public Service Practices A Comparative Analysis between Indonesia and Malaysia Oleh : <i>Dr. Solatun Dulah Sayuti</i> (Academy of Malay Studies University of Malaya, Kualalumpur, Malaysia)	102
8. Aspek Budaya dan Adaptasi Birokrasi terhadap Penyimpangan Oleh : <i>Dr. Rawuh Edy Priyono</i> (Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto)	125
9. Politisasi Birokrasi Era Pilkada Langsung Oleh : <i>Abdul Hamid, M.Si</i> (Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten)	132
10. Ketidakpatutan dalam Sistem Administrasi Negara Kesatuan RI : <i>Perilaku Fraud</i> Oleh : <i>Ayi Karyana, M. Si & Yuli Tirtariandi El Anshori, SIP, MAP</i> (Universitas Terbuka)	146
11. Format dan Efektifitas Reformasi Birokrasi Indonesia Oleh : <i>Drs. Argo Pambudi, M. Si</i> (Universitas Negeri Yogyakarta)	164
12. <i>Affirmative Action</i> dalam Rekrutmen Tenaga Honorer Daerah Oleh : <i>Kurnia Nur Fitriana, S.I.P</i> (Universitas Negeri Yogyakarta)	174
13. Pelayanan Publik dan Etos Kerja Aparatur Pemerintah Oleh : <i>Sugi Rahayu, M.Pd., M.Si.</i> (Universitas Negeri Yogyakarta)	202
14. Mewujudkan <i>Good Governance</i> Melalui Pendekatan Spritual sebagai Perspektif dalam Kerja Oleh : <i>Rosidah, M.Si.</i> (Universitas Negeri Yogyakarta)	210
15. Upaya Pemberantasan Korupsi dalam Birokrasi Indonesia Oleh : <i>Chasidin, S.Sos dan Dr. Slamet Rosyadi, M.Si.</i> (MAP Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto)	220

BAGIAN II

BIDANG KEBIJAKAN PUBLIK

1. Liberalisasi dalam Formulasi Kebijakan Tata Ruang Kota Wilayah (Studi Tentang Alih Fungsi Lahan Pertanian di Tepian Kota Surakarta Suatu Perspektif Ekonomi Politik Oleh : <i>Drs. Budiman Widodo, M.Si.</i> (STIA ASMI Solo)	232
---	-----

2. Suatu Tinjauan Tentang Kebijakan Simbolisasi Agama di Sekolah Kota Padang Oleh : <i>Siska Sasmita, MPA.</i> (Universitas Negeri Padang)	255
3. <i>Rent Seeking Behaviour</i> dalam Relasi Birokrasi dan Dunia Bisnis Oleh : <i>Syamsul Ma'arif, S.IP., M.Si.</i> (Jurusan Ilmu Administrasi Negara UNILA, Lampung)	263
4. Perspektif Multidimensional dalam Kebijakan Publik Oleh : <i>Dra. Sri Djoharwinarlieni, SU.</i> (FISIPOL Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta)	277
5. Kebijakan Pembentukan Komponen Cadangan di Indonesia Oleh : <i>Suryo Wibisono, S.IP & Dr. Ali Rokhman</i> (MAP Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto)	285
6. Negara dan Penguasaan Tanah Oleh : <i>Dr. Winarti, M.Si.</i> (Universitas Slamet Riyadi, Surakarta)	297
7. Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir dalam Perspektif Otonomi Daerah (Tinjauan Kota Bengkulu dan Kabupaten Bengkulu Selatan) Oleh : <i>Prof. Dr. H.Masyhudzulhak Djamil Mz. S.E., MM.</i> (STIA Bengkulu)	334
8. Kajian Evaluasi Program Kebijakan Tiga Pilar Pembangunan Kota Bengkulu Oleh : <i>Dr. Nour Faroz Agus, SE., M. Si.</i> (STIA Bengkulu)	344
9. Menelusuri Wacana Pengelolaan Hutan oleh Negara di Pulau Jawa Oleh : <i>Yanuardi, M. Si.</i> (Universitas Negeri Yogyakarta)	354
10. Reformasi Perizinan di Kabupaten Solok, Sumatera Barat Oleh : <i>Afriva Khaidir, MAPA, Ph.D.</i> (Universitas Negeri Padang)	369
11. Kebijakan Berbasis Politik Rekognisi dan Resolusi Konflik Etnik : Kisah Sukses dari Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah Oleh : <i>Dr. Suharno, S.Pd, M.Si.</i> (Universitas Negeri Yogyakarta)	384

BAGIAN III

BIDANG DESENTRALISASI DAN KELEMBAGAAN LOKAL

1. Akan Diputar Ke Manakah Kedudukan Desa : Tetap sebagai Self Governing Community, Ke Local State Government, atau Ke Daerah Otonom ? Oleh : <i>Dr. Hanif Nur Cholish, M.Si.</i> (Universitas Terbuka)	398
2. Analisis Belanja Daerah Pasca UU No. 32 tahun 2004 dan Beberapa Dampaknya terhadap Kinerja Pembangunan Oleh : <i>Dr. Slamet Rosyadi</i> (MAP Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto)....	418

3.	Memotret Kelembagaan Kecamatan menuju Optimalisasi Peran Kecamatan dalam Memberikan Pelayanan kepada Masyarakat (Studi pada Kecamatan Bantul dan Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul) Oleh : <i>Shafiera Amalia, SIP.</i> (Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur I Lembaga Administrasi Negara RI)	439
4.	Kerjasama antar Daerah di Indonesia : Isu dan Tantangan Oleh : <i>Dr. Hardi Warsono, MPP</i> (Universitas Diponegoro, Semarang)	461
5.	Pemberdayaan Lembaga Pemerintahan Nagari melalui Pendekatan <i>Balanced Scorecard</i> Oleh : <i>Drs. Karjuni Dt. Maani, M.Si.</i> (Universitas Negeri Padang)	473
6.	Manajemen Bencana Alam di Jawa Tengah Oleh : <i>Dr. Dra Hartuti Purnaweni, MPA.</i> (Universitas Diponegoro, Semarang)	483
7.	Pengorganisasian Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) di Desa Kalongsawah, Kecamatan Jasing, Kabupaten Bogor Oleh : <i>Ayi Karyana, M. Si & Yuli Tirtariandi El Anshori, SIP, MAP.</i> (FISIP Universitas Terbuka)	493
8.	Mengapa Sultan harus Menjadi Gubernur ? Oleh : <i>Dr. Samodra Wibawa dan Ahmad Juary</i> (Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta)	515
9.	Otoritas Tradisional dan Prospeknya dalam Pemerintahan Nagari yang Partisipatif Oleh : <i>Drs. Yasril Yunus, M.Si.</i> (Universitas Negeri Padang)	531
10.	Peran Pemerintah Lokal dalam Pengurangan Resiko Bencana Oleh : <i>Putri Amal Wijayanti, S. Sos dan Dr. Slamet Rosyadi, M. Si.</i> (Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto)	541
Lampiran :		
1.	Kesimpulan Simposium Nasional Ilmuwan Administrasi Negara untuk Indonesia di Universitas Negeri Yogyakarta, 25 – 26 Maret 2011	547
2.	Naskah Deklarasi Pembentukan Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara (ASIAN)	550

Malakah pengantar :

Berfikir Jernih tentang Administrasi Negara :
Menuju Masyarakat Madani

Oleh :

Prof. Dr. H. Jusuf Irianto, M.Com

Guru Besar Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Airlangga, Surabaya

Mengandalkan Peran Administrasi Negara

Jika difikirkan secara jernih, maka administrasi negara (*public administration*) harus dirujuk pada adanya sejumlah pejabat dan aparat yang mengemban amanah, lembaga (*institutions*) yang efektif, serta serangkaian proses yang menjamin keberlangsungan implementasi kebijakan sebagai produk yang memiliki kekuatan hukum dan perundang-undangan tetap. Sebagai cabang dari ilmu politik, administrasi negara telah mengalami perkembangan yang sangat pesat seiring dengan kemajuan yang telah diraih oleh peradaban mutakhir umat manusia. Administrasi negara menjadi bidang ilmu yang menarik minat dan perhatian para ahli dan praktisi khususnya sejak awal abad 20 hingga kini.

Pandangan klasik yang patut dikenang di awal perkembangan administrasi negara tampaknya harus diarahkan pada kurun waktu akhir abad 19 hingga awal abad 20. Pada tahun 1886 Presiden Amerika Serikat *Woodrow Wilson* menulis esai dengan judul "*The Study of Administration*". Wilson yang juga seorang ilmuwan politik merekomendasikan untuk memisahkan isu-isu administrasi dengan politik. Wilson juga mengingatkan bahwa isu-isu administratif bukanlah merupakan unsur politik. Sementara pada tahun 1912, *Frederick Taylor* (mewakili praktisi) menegaskan bahwa bidang studi administrasi negara harus didekati secara ilmiah (*scientific approach*) dengan dukungan berbagai macam studi khususnya yang berkembang dalam ilmu manajemen yang menekankan pentingnya nilai-nilai rasionalitas.

Secara tradisional, administrasi negara sering diartikulasikan sebagai proses mengorganisasikan semua sumber daya baik manusia maupun non-manusia untuk mencapai berbagai tujuan dan kepentingan publik. Proses manajerial tersebut merupakan tindak lanjut dari formulasi kebijakan publik dalam bentuk implementasi dan pengelolaan berbagai keputusan yang telah dihasilkan. Realitas menunjukkan bahwa dalam dinamika implementasi kebijakan tersebut dapat dilihat munculnya deskripsi fenomenal, bahwa ternyata administrasi negara tidak hanya sekedar merupakan suatu ilmu. Namun demikian, lebih daripada sebagai ilmu, administrasi negara juga merupakan suatu seni dalam mengatur semua permasalahan publik. Administrasi negara adalah *science and art*. Sebagai suatu ilmu, administrasi negara memiliki tujuan untuk memecahkan berbagai permasalahan publik melalui perbaikan organisasi dan manajemen.

Dalam rangka melakukan perumusan dan implementasi kebijakan publik tersebut, administrasi negara memiliki kemampuan untuk menjangkau berbagai isu mutakhir yang berkembang dalam kehidupan masyarakat. Kemampuan tersebut secara sistematis dan efektif ditunjukkan oleh administrasi negara yang menjalankan peran dan fungsinya dengan melandaskan diri pada 6 (enam) perspektif utuh. Perspektif administrasi negara tersebut dapat diidentifikasi sebagai kebijakan, kelembagaan, pengelolaan, etika, lingkungan, serta perspektif tanggung jawab. Berawal dari perspektif kebijakan, administrasi negara berusaha untuk memecahkan semua persoalan kehidupan masyarakat pertama kali dengan melalui proses pembuatan keputusan untuk menentukan tujuan dan metode terbaik dalam mengatasi masalah tersebut.

Persoalan besar dalam menindaklanjuti keputusan yang telah dibuat adalah dukungan kelembagaan sebagai instrumen utama dalam tahapan implementasi. Dengan perspektif kelembagaan, administrasi negara secara internal mengatur struktur dirinya dengan mengembangkan dan membentuk berbagai unit atau satuan kerja tertentu, membagi dan kemudian mendelegasikan wewenang serta tugas dan tanggung jawab serta koordinasi antar unit atau satuan kerja. Terbentuknya unit atau satuan kerja terspesialisasi dalam bentuk berbagai lembaga publik inilah yang dikenal sebagai buah dari perspektif kelembagaan.

Kemudian administrasi negara mulai menampakkan wujud jati-dirinya secara nyata dengan perspektif pengelolaan (manajemen). Dilihat dari perspektif inilah administrasi negara menunjukkan sejumlah proses kegiatan yang secara sengaja dirancang dan dilakukan untuk mencapai berbagai tujuan yang telah ditetapkan. Tidak sekedar teknis, dari perspektif pengelolaan ini telah membuat administrasi negara menjadi kian berbobot dengan lahirnya sejumlah prinsip manajemen (*the principles of management*) sebagai dasar pengelola organisasi dalam melaksanakan berbagai tugas, peran dan fungsinya.

The most important thing dalam fungsi administrasi negara adalah perspektif etika. Semua aktor yang terlibat baik dalam tahapan perumusan hingga evaluasi kebijakan harus memiliki *mindset* tentang perlunya nilai spesifik yang dapat membedakan “salah” dan “benar” serta “baik” dan “buruk”. Perspektif etika dalam administrasi negara memiliki *a pivotal role* sebagai panduan aktor dalam mempersepsi suatu obyek kebijakan, bersikap, dan kemudian berperilaku secara elegan.

Keutuhan perspektif administrasi negara sebagaimana telah disebutkan sebelumnya ditandai dengan adanya perhatian birokrasi pada setiap situasi yang berkembang tidak hanya secara internal namun juga pada lingkungan eksternal. Dengan perspektif lingkungan, administrasi negara berusaha untuk selalu antisipatif melalui langkah kegiatan mengidentifikasi arah kecenderungan perubahan yang sedang dan akan terjadi dalam kondisi lingkungan sekitar. Perubahan tersebut diyakini memang dapat mempengaruhi struktur organisasi, pengelolaan, kebijakan dan bahkan nilai-nilai etika dan tanggungjawab moral.

Akhirnya dengan melihat administrasi negara melalui perspektif sebagai pamungkas yakni tanggung jawab atau akuntabilitas, masyarakat dapat merasakan tentang semakin perlunya kehadiran sekaligus peran, fungsi serta kedudukan suatu pemerintahan dalam menjalankan berbagai fungsi pengelolaan kehidupan masyarakat dalam suatu negara melalui kebijakan publik.

Makna administrasi negara menjadi kian mendalam seiring dengan dinamika yang berkembang dalam lingkungan sekitarnya. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi serta perubahan sosial yang terjadi telah menunjukkan dan melahirkan adanya pergerakan kebudayaan manusia yang kian terbuka. Dalam konteks yang demikian inilah ilmu dan seni administrasi negara secara responsif melakukan sejumlah pencarian untuk menemukan berbagai nilai (*values*). Nilai-nilai tersebut akhirnya menjadi dasar bagi wujud administrasi negara yang secara ajeg mengedepankan efisiensi, efektivitas, rasionalitas, keadilan sosial, transparansi, dan akuntabilitas kinerja sebagaimana tercermin dalam *state of the arts* substansi administrasi negara yaitu *good governance*. Administrasi negara akan “ditinggalkan” *user*-nya jika tidak mampu mengantarkan masyarakat menuju kehidupan yang lebih baik. Nilai-nilai *good governance* itulah yang mengokohkan posisi administrasi negara hingga saat ini.

Dengan peran dan fungsi yang *embedded* dalam administrasi negara, semua pihak dapat membuat kesepakatan bahwa posisi ilmu dan seni ini memang sangat penting dalam setiap upaya memberi penguatan pada setiap jengkal kehidupan masyarakat. Substansi administrasi negara adalah menyajikan pelayanan bagi masyarakat sedemikian rupa efektif sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat itu sendiri. Peran dan fungsi administrasi negara menjadi kian elok dengan melihat bahwa pemerintah di setiap negara selalu berusaha meningkatkan profesionalisme aparaturinya, mengembangkan

berbagai metode peningkatan efisiensi, efektivitas serta produktifitas aparatur dan organisasi. Masyarakat selalu berharap bahwa pemerintah dapat mencerahkan kehidupannya sebagaimana tercermin dalam ideologi masyarakat madani. Dalam kondisi yang demikian inilah, akhirnya dapat disadari bahwa administrasi negara kini menjadi bagian penting yang dapat diandalkan untuk mewujudkan masyarakat madani itu.

Kegiatan Administrasi Negara

Kegiatan administrasi negara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat menjangkau semua aspek kehidupan mulai dari kebutuhan dasar berupa pelayanan kesehatan, pendidikan, pekerjaan dan pendapatan ekonomi, hingga masalah-masalah kebutuhan legalitas dan ketertiban masyarakat serta menjalin hubungan dengan pihak luar negeri. Di samping itu pemerintah juga berkewajiban mendorong akselerasi pembangunan dengan kemampuannya menyediakan infrastruktur untuk mendorong dan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi berupa tatanan fisik dan non-fisik yang efisien. Dengan demikian kegiatan mulia administrasi negara tersebut sekaligus juga dimaksudkan untuk menjamin terbangunnya sistem sosial, budaya, hukum, politik, dan ekonomi yang mengarahkan pada pencapaian tingkat pengembangan kualitas manusia secara optimal.

Dukungan kelembagaan yang selama ini menjadi fokus reformasi birokrasi di Indonesia secara formal dilakukan kementerian dan non-kementerian di tingkat pusat. Sementara di daerah dilakukan berbagai perangkat berupa sekretariat daerah, dinas, badan, kantor, dan lembaga lainnya. Secara operasional, kegiatan administrasi negara merupakan kegiatan yang dilakukan pejabat struktural yang memimpin suatu unit atau satuan kerja tertentu maupun oleh pejabat bukan pimpinan unit atau satuan kerja. Secara khusus, fokus kegiatan administrasi negara diarahkan pada aspek pengelolaan dari implementasi kebijakan publik. Proses perbaikan kelembagaan hingga saat ini menjadi persoalan sangat serius khususnya dalam mewujudkan administrasi negara di Indonesia yang efektif dan efisien.

Hal mendasar dari kegiatan administrasi negara berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai yakni memenuhi semua kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Dengan demikian orientasi aparatur dalam birokrasi tidak lain merupakan representasi kepentingan masyarakat. Dalam konteks yang demikian inilah akhirnya dapat dipahami tentang perlunya netralitas dan *mindset* aparat dan birokrasi yang harus menitikberatkan pada kepentingan masyarakat.

Esensi Administrasi Negara

Sejalan dengan rekomendasi Wilson dan pandangan Taylor, esensi administrasi negara adalah rasionalitas. Untuk menegaskan pandangan esensial ini patut disimak tulisan Ignace Snellen (2002) berjudul "*Conciliation of Rationalities: The Essence of Public Administration*" yang dimuat dalam jurnal *Administrative Theory & Praxis* berikut.

“..... *rationality is seen as the core of public administration. In history this core is approached successively in a predominantly legal-procedural, a political, a scientific and an economic way..... every act of public administration has to meet simultaneously the requirements of four rationalities.....*”

Uraian klasik Wilson dan Taylor yang kemudian diingatkan kembali oleh Snellen dalam administrasi negara kontemporer sebenarnya memperkuat pandangan klasik sebelumnya dari Max Weber tentang *bureaucracy*. Birokrasi selama ini di mata masyarakat memiliki stigma dengan konotasi sebagai terlalu kompleks, berprosedur dan dengan aturan yang rigid dan *inflexible*, serta dihuni oleh orang-orang yang tidak kompeten. Padahal menurut Weber, birokrasi tidak lain merupakan konsekuensi dari peningkatan kompleksitas kehidupan masyarakat itu sendiri. Untuk mengatasi kompleksitas tersebut, Weber menyajikan suatu preskripsi tentang perlunya berbagi asas (*principles*) yakni spesialisasi, hirarki, seperangkat peraturan dan prosedur serta aparat yang profesional dan tidak dipilih berdasarkan aliansi politik tertentu. Model esensial dari Weber inilah yang hingga kini merupakan sumbangan fenomenal bagi administrasi negara yang menegaskan kembali bahwa birokrasi merupakan suatu bentuk rasionalisasi organisasi dalam masyarakat.

Sementara itu, administrasi negara kontemporer yang terpusat pada tema tentang reformasi birokrasi dan administrasi mendapat sentuhan perspektif mutakhir, termasuk munculnya serangkaian konsep seperti *good governance* dan *electronic government*. Semua konsep tersebut bagaikan resep yang mengandung obat-obatan untuk menyembuhkan penyakit kronis dalam pelayanan publik.

Reformasi Birokrasi

Sebagai esensi administrasi negara, rasionalitas birokrasi berkembang sedemikian rupa sehingga semua isu dan tema yang berkembang secara *scientific* mengarah pada kebutuhan praksis kemasyarakatan. Sebagai ilmu yang bersentuhan langsung dengan politik, administrasi negara memiliki peran sangat penting dalam suatu negara dengan jajaran pemerintahannya guna mewujudkan tujuan negara sebagaimana tertera dalam Undang-undang Dasar (UUD) 1945. Kualitas pemerintahan dideterminasi oleh bangunan sistem pelayanan administrasi negara kepada warga negara/masyarakat. Sejalan dengan tuntutan pelayanan berkualitas kepada warga negara itulah administrasi negara kembali melahirkan istilah yang sangat populer saat ini yakni “reformasi birokrasi”. Lahirnya istilah ini menjadi penanda bagi fenomena pergeseran paradigma administrasi negara di Indonesia yang sebetulnya sudah mulai terjadi sejak tahun 1950-an hingga dekade 2000-an ini.

Sebagaimana telah diuraikan di bagian awal pengantar ini, bahwa paradigma klasik administrasi negara dalam perkembangannya mendapat kritik yang sangat tajam. Wilson dan Taylor serta Weber dan pendukung administrasi klasik lainnya terlalu yakin bahwa se-

perangkat lembaga atau intitusi negara, proses legal formal dan prosedur, serta sistem dan struktur organisasi dapat sungguh-sungguh memberikan pelayanan kepada masyarakat secara efektif. Dalam kenyataannya, keyakinan tersebut terbukti mengalami sejumlah ambivalensi. Organisasi birokrasi rasional yang bekerja melalui sejumlah aturan dan prosedur dengan dukungan aparaturnya atau pegawai negeri sipil secara pasang-surut mengalami pembiasaan yang cenderung bersifat politis dan terlembagakan secara ketat. Bertambahnya aturan secara internal serta pola kerja yang cenderung rutin dengan tugas yang tetap dan monoton akhirnya justru membuat pegawai negeri sipil terjebak dalam "zona kenyamanan" yang berakibat birokrasi sangat lamban melayani dan mengatasi semua kebutuhan masyarakat.

Birokrasi dengan model klasik dinilai tidak tanggap atau responsif terhadap semua kebutuhan masyarakat yang menginginkan pelayanan serba cepat dan efektif. Negara yang sudah terlanjur lamban, akhirnya secara global berposisi marginal dengan bukti puluhan survei lokal, nasional, dan internasional yang memposisikan Indonesia sebagai negara yang tidak "ideal" dalam berbagai bidang. Sumber daya dan kekayaan potensial lain tidak termanifestasikan secara efisien dan efektif, sementara praktek korupsi dan kolusi kian subur sedemikian rupa sehingga menyebabkan birokrasi menjadi sasaran empuk cercaan masyarakat. Dalam situasi yang demikian inilah, birokrasi harus mentransformasi dirinya agar kepercayaan masyarakat kembali diraih dengan ujung pada penolakan terhadap anarki serta mewujudkan ketertiban masyarakat. Pandangan model klasik dalam administrasi negara merupakan setapak jalan panjang sejarah ilmu ini yang bisa jadi merupakan batu pijakan bagi berkembangnya pemikiran alternatif yang melahirkan paradigma baru, kontemporer dan progresif. *New Public Management*, *Good Governance*, serta *Sound Governance* yang menekankan pada pengembangan inovasi dalam kebijakan dan administrasi adalah sederetan hasil pemikiran kontemporer sebagai acuan birokrasi di berbagai negara dalam mereformasi dirinya.

Dengan pemikiran dan paradigma baru dalam administrasi negara, birokrasi mengembangkan sayap kualitas pelayanannya dengan menjangkau sejumlah isu strategis kemasyarakatan. Kedalaman dan keluasan khasanah administrasi negara semakin nyata dengan sejumlah kemampuannya mengatasi berbagai isu dalam masyarakat. Sekarang para ahli (*scholars*) dan mahasiswa administrasi negara di Indonesia dan bahkan negara lain tidak mempelajari materi-materi pembelajaran yang *absurd*. Semua pemangku kepentingan administrasi negara sedang memfokuskan energinya untuk selalu berusaha mengikuti arah perubahan yang sedang dan yang akan terjadi. Maka kekayaan ilmu dan seni administrasi negara semakin bertambah dengan munculnya berbagai isu kontemporer, misalnya otonomi daerah dan desentralisasi, reformasi birokrasi dan administrasi, peningkatan kualitas layanan publik, tata kelola yang baik, era dan rezim globalisasi, mana-

jemen dan pengembangan sumber daya manusia aparatur, serta era *e-government* dan *e-procurement* yang mendorong era transparansi dalam birokrasi serta kebijakan publik. Dengan semua isu itulah, administrasi negara mencapai *sustainable competitive advantage* yang dapat bersanding dan bahkan melampaui disiplin ilmu lainnya dalam menciptakan peningkatan kesejahteraan dan peradaban umat manusia.

Buku yang sedang ada di tangan pembaca inilah yang sangat diharapkan menjadi instrumen penting dalam mencapai tujuan-tujuan pemerdayaan ilmu dan seni administrasi negara.

Bahan Bacaan

Farazmand, Ali (ed), 2004. *Sound Governance: Policy and Administrative Innovations*. Praeger Publishers, Westport – Connecticut.

Shafritz, Jay M., Hyde, Albert C., & Parkes, Sandra J., 2004. *Classics of Public Administration*. Thomson Learning, Wadsworth.

Snellen, Ignace, 2002. Conciliation of Rationalities: The Essence of Public Administration *Administrative Theory & Praxis*. 24 (2): 323-346.

Ventriss, Curtis, 1991. Contemporary Issues in American Public Administration Education: The Search for an Educational Focus. *Public Administration Review*. 51(1): 4-14.